

KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Agricultural Household Welfare in North Sumatra Province

Febrianto Nainggolan*, Meilani Thereza Br. Saragih**

*BPS Kabupaten Kepahiang, *E-mail*: febrianto.nainggolan@bps.go.id

**BPS Kabupaten Toba

ABSTRAK

Sebagai negara yang memiliki banyak petani, kesejahteraan rumah tangga pertanian merupakan salah satu fokus pembangunan Indonesia. Sumatera Utara merupakan provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah petani terbanyak di Indonesia dapat menjadi contoh dalam penerapan kebijakan terkait upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rumah tangga dan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga pertanian di Sumatera Utara pada tahun 2020. Penelitian ini mengolah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional(SUSENAS) Maret 2020 dengan menggunakan metode analisis regresi logistik biner. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin KRT, tingkat pendidikan KRT, usia KRT, akses terhadap layanan kredit, kepemilikan tabungan, dan jumlah ART memengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga pertanian. Berbagai kebijakan perlu dilakukan pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga pertanian, seperti mensosialisasikan pemanfaatan kredit dan tabungan sebagai modal usaha pertanian, meningkatkan pengendalian KB, serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para petani.

Kata kunci: kemiskinan, kesejahteraan, rumah tangga, pertanian

ABSTRACT

As a country which has many farmers, the welfare of agricultural households is one of the concerns on Indonesia's development. North Sumatra is the province located outside of Java Island with the largest number of farmers in Indonesia can be an example of implementing policies related to the welfare of agricultural households. This study aims to analyze household characteristics and the factors that influence the welfare of agricultural households in North Sumatra in 2020. This study processed the data from the March 2020 Susenas using the binary logistic regression analysis. The findings of this study show that the head of household's gender, education level of household head, age of household head, access to credit services, ownership of savings, and the number of household members affect the level of welfare of agricultural households. Various policies need to be carried out by the government to enhance the agricultural households' welfare, such as socializing the use of credit and savings as agricultural business capital, increasing family planning control, and providing education and training for farmers.

Keywords: agriculture, household, poverty, welfare

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan dapat dideskripsikan melalui kemampuan individu atau sekelompok individu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memperoleh akses terhadap sumber daya. Permasalahan kesejahteraan terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bahkan, di Indonesia, masalah kesejahteraan ini merupakan salah satu fokus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Akan tetapi, nyatanya masalah kemiskinan di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Menurut BPS (2020a), pada Maret 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,78 persen atau meningkat 0,37 persen dibandingkan Maret 2019.

Masalah kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ramadhani & Putra (2019) menyatakan bahwa seseorang yang bekerja tidak menjamin bahwa dirinya sejahtera (tidak miskin). Hal ini karena masih ditemukan adanya pekerja yang berprinsip “asalkan tidak mengganggu”, tanpa memperhatikan apakah kebutuhan dasar pekerja dapat terpenuhi dengan menggunakan pendapatan yang diperolehnya melalui pekerjaan tersebut. Akibatnya, terdapat kelompok pekerja yang terperangkap dalam kemiskinan.

Pada pengukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga, lapangan usaha atau sumber penghasilan utama dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur. BPS (2020a) menemukan bahwa mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia berpenghasilan utama dari sektor pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga dengan sumber penghasilan utamanya dari sektor pertanian juga merupakan yang tertinggi dibandingkan rumah tangga dengan sumber penghasilan lainnya, yaitu sebesar 12,52 persen. Artinya, 12,52 persen dari seluruh rumah tangga yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama di Indonesia merupakan rumah tangga miskin (BPS, 2020a).

Kemiskinan pada rumah tangga sektor pertanian merupakan kondisi yang kurang ideal sekaligus menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Tantangan utama sektor pertanian yang sering dijumpai adalah terkait jumlah tenaga kerja dan upah di sektor pertanian. Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap proporsi tenaga kerja di Indonesia. Akan tetapi, upah yang diperoleh petani umumnya rendah. Mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil yang berpendidikan menengah ke bawah dan memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi pertanian modern. Akibatnya mereka memiliki upah yang rendah dan cenderung masuk ke dalam jurang kemiskinan (Kementerian PPN/Bappenas, n.d.). Hal ini didukung dengan temuan BPS pada tahun (2020b) bahwa rata-rata pendapatan bersih dalam sebulan yang diperoleh pekerja sektor pertanian merupakan yang terendah dibandingkan sektor pekerjaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian perlu mendapat perhatian lebih karena kondisi kesejahteraan yang

mengkhawatirkan sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian namun tidak diiringi dengan upah yang cukup tinggi.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan luas lahan baku sawah terluas di Indonesia dengan jumlah petani sebanyak 1.858.642 petani (BPS, 2019) atau merupakan petani terbanyak yang dimiliki oleh provinsi di luar Pulau Jawa. Besarnya potensi ini menjadikan sektor pertanian berperan penting bagi perekonomian Sumatera Utara. Selain itu, pada tahun 2020, sektor pertanian mampu menyumbang 21,34 persen dari total PDRB (BPS, 2021a) dan 35,43 persen dari total tenaga kerja Sumatera Utara (BPS, 2021b). Hal ini membuktikan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran yang dominan terhadap pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara.

Akan tetapi, dibalik potensi sektor pertaniannya yang besar, provinsi Sumatera Utara tetap menghadapi permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu kesejahteraan para petani. Banyaknya jumlah petani di Sumatera Utara tidak diimbangi dengan tingginya tingkat kesejahteraan. Kondisi tersebut digambarkan melalui rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) per subsektor di Sumatera Utara pada tahun 2020, dimana hanya satu subsektor pertanian yang berada di atas 100, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 125,05 (BPS, 2020d). Sedangkan rata-rata NTP subsektor lainnya berada di bawah 100, yaitu tanaman pangan (96,90), hortikultura (97,28), peternakan (98,74), dan perikanan (98,58) (BPS, 2020d). Hal ini menunjukkan bahwa hanya kelompok petani pada subsektor tanaman perkebunan rakyat saja yang berpendapatan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, sedangkan petani pada empat subsektor lainnya mengalami defisit atau memiliki pendapatan yang lebih kecil daripada pengeluarannya.

Selain itu, hasil Sakernas pada tahun 2020 menggambarkan nilai rata-rata pendapatan rumah tangga di Sumatera Utara yang bersumber dari sektor pertanian (pendapatan dari usaha di sektor pertanian dan pendapatan buruh pertanian) bukan yang tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di luar pulau Jawa (BPS, 2020c). Padahal, jumlah petani di Sumatera Utara merupakan yang terbanyak di luar pulau Jawa.

Berbagai program ataupun kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, diantaranya memberikan subsidi pupuk, membatasi impor hasil pertanian, dan memberikan berbagai bantuan alat-alat pertanian. Akan tetapi, program dan kebijakan tersebut dinilai belum terlaksana dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan analisis lanjutan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kesejahteraan petani sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan selanjutnya. Isu kesejahteraan petani ini menjadi menarik untuk dibahas karena karakteristik Sumatera Utara sebagai provinsi diluar pulau Jawa dengan jumlah luas lahan baku terluas dan

petani terbanyak. Karakteristik tersebut dipandang dapat menjadi dasar bagi daerah lain dalam melaksanakan kebijakan di sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumah tangga pertanian di Sumatera Utara berdasarkan kesejahteraan dan karakteristik yang berkaitan dan menganalisis determinan kesejahteraan rumah tangga pertanian di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

II. TINJAUAN TEORITIS

Kesejahteraan

Undang-Undang Nomor 11 yang dikeluarkan pada tahun 2009 menyebutkan konsep kesejahteraan sosial sebagai kondisi ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga negara Indonesia telah terpenuhi agar memiliki kehidupan yang layak dan kemampuan mengembangkan diri, sehingga warga negara tersebut dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya. Kesejahteraan dapat juga didefinisikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pendapatan yang sesuai, aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mudah, serta ketersediaan pekerjaan yang cukup (Sukirno, 2015).

Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua konsep yang berasosiasi. Kemiskinan berarti tidak tercapainya kondisi kesejahteraan, dan sebaliknya. Pengukuran tingkat kesejahteraan dapat dibantu dengan menggunakan konsep kemiskinan. Definisi kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang masuk ke dalam kategori miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dimiliki orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, garis kemiskinan adalah nilai total pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya, baik makanan maupun bukan makanan, selama sebulan.

Rumah Tangga Pertanian

Berdasarkan pada konsep BPS, rumah tangga dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal pada sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan memenuhi serta mengurus kebutuhan sehari-hari secara bersama-sama. Secara spesifik, rumah tangga pertanian dapat didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki minimal satu orang anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan menghasilkan produk pertanian untuk memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri melalui penjualan atau pertukaran dari sebagian atau seluruh hasil pertanian tersebut.

Menurut Hermawan (2012), sektor pertanian berperan penting dalam mengurangi kemiskinan secara agregat. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi di Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki hubungan signifikan negatif terhadap kondisi

kemiskinan(Sihombing & Bangun, 2019). Hal ini menjelaskan bahwa sektor pertanian berperan penting dalam dinamika perekonomian di Sumatera Utara.

Secara umum memang sektor pertanian memiliki dampak yang baik bagi kesejahteraan secara agregat. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih dalam, ternyata masih ditemui banyak rumah tangga pertanian yang mengalami kemiskinan. MenurutWarto (2015), kurang optimalnya pendayagunaan lahan pertanian menjadi salah satu penyebab kemiskinan pada rumah tangga pertanian. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kurangnya minat generasi muda untuk memanfaatkannya sebagai media pengembangan teknologi pertanian. Sementara di sisi lain, tidak sedikit generasi tua yang hanya mengandalkan teknik pertanian konvensional yang tidak memberikan peningkatan hasil pertanian yang signifikan. Kedua kondisi yang umum ditemui tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga pertanian.

Selain itu, berdasarkan hasil kajian yang dilakukanWarto (2015), kemiskinan petani di Indonesia dapat terjadi karena keadaan *force majeure*. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya alam seperti lahan pertanian yang tandus, iklim yang kurang mendukung kegiatan bertani, ataupun bencana alam. Berbagai hal tersebut memengaruhi hasil pertanian sehingga secara tidak langsung memengaruhi kesejahteraan petani.

Penelitian Relevan

Tidak sedikit peneliti yang telah melakukan analisis kemiskinan pada level rumah tangga dan menunjukkan hasil bahwa variabel ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Kepemilikan modal seperti tabungan, serta akses layanan keuangan seperti kredit terbukti berpengaruh terhadap kemiskinan. Kepemilikan tabungan oleh seseorang dapat meningkatkan akumulasi kekayaan/modal dalam rumah tangga, sehingga dapat membantu rumah tangga untuk melakukan kegiatan ekonomi(Adnyani & Sugiharti, 2019). Secara khusus, kepemilikan tabungan dalam keluarga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian(Han et al., 2019).Selain itu, menurutNasiraei et al.(2013), mudahnya akses terhadap layanan kredit juga dapat membantu rumah tangga dalam peningkatan modal usaha pertanian, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Selain variabel ekonomi, terdapat juga beberapa penelitian yang menemukan pengaruh variabel demografi terhadap kemiskinan. Penelitian Majeed & Malik (2015)menemukan bahwa tempat tinggal memiliki hubungan negatif terhadap status kemiskinan suatu rumah tangga. Karakteristik rumah tangga yang berada di perkotaan memiliki peluang 60 persen lebih kecil untuk mengalami kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang ada di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh produktivitas di daerah perdesaan umumnya lebih rendah, sehingga pendapatan pun menjadi lebih rendah dibandingkan perkotaan. Selain itu, kecilnya kesempatan kerja serta fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai pun berkontribusi pada tingkat kemiskinan di perdesaan(Garza-Rodriguez et al., 2021).

Penelitian mengenai keterkaitan jenis kelamin kepala rumah tangga dengan status kemiskinan juga telah beberapa kali dilakukan. Salah satu temuan penelitian terkait jenis kelamin dan status kemiskinan yaitu rumah tangga dengan seorang kepala rumah tangga (KRT) berjenis kelamin laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk dapat membantu rumah tangga lepas dari kondisi miskin daripada KRT perempuan (Sharma & Singh, 2015). Pada rumah tangga pertanian, Nwaru (2005) menyatakan bahwa KRT laki-laki memiliki mobilitas yang lebih baik, sehingga dapat memanfaatkan teknologi dan peralatan pertanian yang lebih baik. Oleh karena itu, penghasilan KRT laki-laki lebih tinggi daripada KRT perempuan. Kondisi ini dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Zewdie (2021) meneliti pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap kemiskinan di Ethiopia Barat Daya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ukuran rumah tangga yang besar mempersulit rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga berarti semakin banyak orang yang harus diberi nafkah oleh kepala rumah tangga. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dan indikator kesejahteraan lainnya. Temuan tersebut juga didukung dengan temuan Nasiraei et al. (2013) bahwa setiap penambahan satu orang anggota keluarga, peluang untuk mencapai kesejahteraan ekonomi menurun 20 persen.

Terdapat banyak pandangan dan temuan mengenai pengaruh status perkawinan terhadap kemiskinan. Ogwumike & Akinnibosun (2013) menyatakan bahwa perkawinan memberikan pengaruh positif dalam menurunkan kemiskinan pada rumah tangga pertanian. Situasi ini disebabkan kepala rumah tangga dan pasangannya dapat bersama-sama berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan. Bahkan, meskipun salah satunya ada yang tidak bekerja dengan tujuan untuk membesarkan anak, anggota pasangan yang lainnya dapat tetap berpartisipasi secara penuh untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (Garza-Rodriguez et al., 2021). Berkebalikan dengan hal tersebut, Chen et al. (2019) menemukan bahwa seseorang yang tidak kawin lebih cenderung untuk sejahtera. Sementara, Cho & Kim (2017) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh status perkawinan terhadap kemiskinan seseorang.

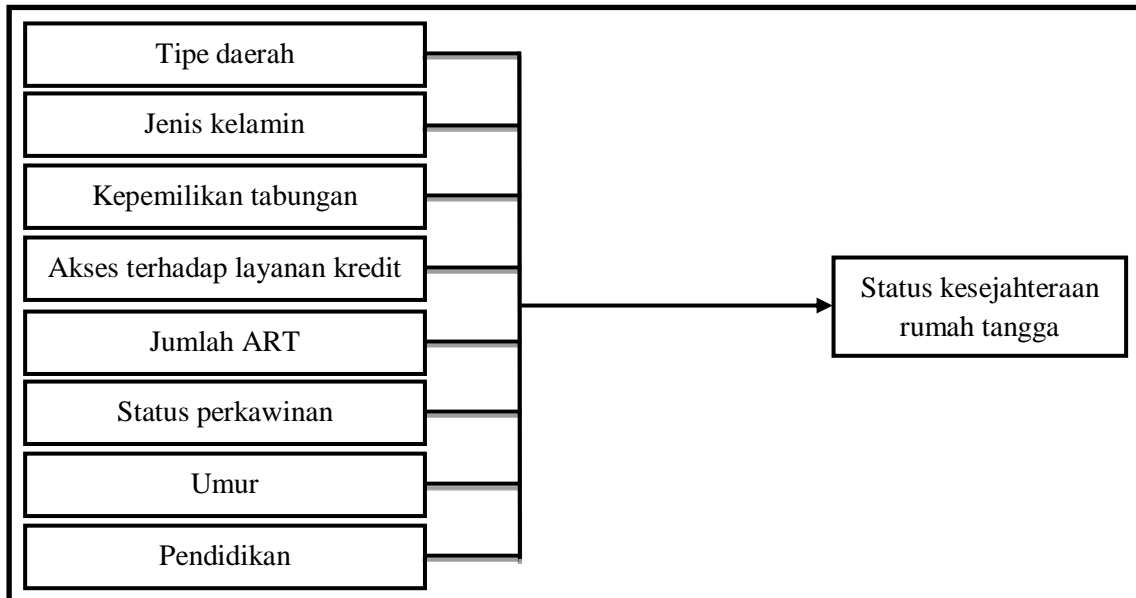
Salah satu hasil penelitian Sharma & Singh (2015) yaitu usia seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kepala rumah tangga pada kelompok usia tua dianggap lebih berpengalaman dalam bekerja dibandingkan kelompok usia dibawahnya. Dengan modal tersebut, mereka dapat lebih dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan dengan imbalan yang lebih besar (Han et al., 2019).

Temuan Adnyani & Sugiharti (2019) dalam penelitiannya terkait kemiskinan yaitu terdapat hubungan positif antara pendidikan kepala rumah tangga dan kemiskinan. Rumah tangga yang dikepalai oleh seorang KRT berpendidikan rendah akan lebih cenderung untuk masuk ke dalam kemiskinan dibandingkan KRT dengan pendidikan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian Han et al. (2019) yang mengafirmasi bahwa KRT yang berpendidikan tinggi

dapat membantu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki petani dapat membantu dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan keahlian yang dimiliki (Mutia, 2020).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terkait dan teori-teori pendukung, dibentuklah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konseptual yang digunakan

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan *raw data* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 modul KOR dan modul KP. Data Susenas merupakan data sekunder yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga pertanian di Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan untuk unit analisis adalah rumah tangga yang dipimpin oleh KRT dengan status bekerja pada lapangan usaha pertanian (mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan). Variabel respon yang digunakan untuk penelitian ini yaitu status kesejahteraan rumah tangga. Sementara, variabel penjelas yang digunakan yaitu tipe daerah, jenis kelamin KRT, kepemilikan tabungan KRT, akses terhadap layanan kredit, jumlah anggota rumah tangga, status perkawinan KRT, umur KRT, dan pendidikan KRT.

Definisi Operasional

1. Status kesejahteraan rumah tangga

Konsep kesejahteraan yang diterapkan dalam penelitian ini didekatkan dengan konsep kemiskinan. Berdasarkan konsep tersebut, rumah tangga dikategorikan tidak sejahtera (miskin) jika rumah tangga tersebut memiliki nilai rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan yang lebih kecil daripada garis kemiskinan (GK) provinsi Sumatera Utara pada Maret

2020, yaitu Rp502.904,00. Sedangkan rumah tangga dikategorikan sejahtera apabila rata-rata pengeluaran perkapita sama atau diatas garis kemiskinan.

2. Tipe daerah

Tipe daerah adalah klasifikasi wilayah tempat tinggal saat pencacahan. Tipe daerah terbagi ke dalam kategori perkotaan dan perdesaan.

3. Jenis kelamin

Jenis kelamin digunakan untuk menjelaskan perbedaan karakteristik rumah tangga dengan kepala rumah tanggaberjeniskelamin laki-laki dan perempuan.

4. Kepemilikan Tabungan

Variabel kepemilikan tabungan diperoleh dari pertanyaan “*apakah (nama) memiliki rekening tabungan atas nama sendiri atau bersama-sama di lembaga keuangan (perbankan, koperasi)?*”. Responden dikategorikanmemiliki tabungan apabilaresponden menyatakanmemiliki rekening tabungan baik padabank swasta maupun bank nasional dengan besar tabungan berapapun atau responden terdaftar sebagai anggota aktif koperasi.

5. Akses terhadap layanan kredit

Rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap layanan kredit apabila memiliki minimal satu anggota rumah tangga yang menerima kredit dalam bentuk apapun dari lembaga pemberi kredit ataupun perorangan selama satu tahun terakhir..

6. Jumlah ART

Jumlah ART adalah banyaknya jumlah anggota rumah tangga saat pencacahan. Pengkategorian jumlah ART dibagi menjadi 2 (dua), yaitu rumah tangga kecil dengan jumlah ART yang kurang dari atau sama dengan 4 (empat) dan rumah tangga besar dengan jumlah ART yang lebih dari 4 (empat).

7. Status perkawinan

Berdasarkan konsep dan definisi BPS, terdapat 4 (empat) status perkawinan, yaitu cerai mati, cerai hidup, belum kawin, dan kawin.. Dalam penelitian ini, status perkawinan dibagi menjadi 2 (dua)kategori, yaitu tidak kawin dan kawin. Seseorang dikategorikan tidak kawin apabila saat pencacahan berstatus belum kawin, cerai hidup, atau cerai mati.

8. Umur

Umur adalah umur kepala rumah tangga saat pencacahan. Pengkategorian umur dibuat berdasarkan pembagian kelompok umur oleh Kementerian Kesehatan (2016). Pada penelitian ini, umur dikategorikan menjadi dua, yaitu diatas 45 tahun dan 45 tahun ke bawah.

9. Pendidikan

Konsep pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan KRT, yang ditentukan berdasarkan ijazah/STTB yang dimiliki. BPS membagi pendidikan ke dalam empat kategori, yaitu tidak sekolah, pendidikan

dasar(SD/ sederajat dan SMP/ sederajat), pendidikan menengah (SMA/ sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma I dan lebih tinggi). Dalam penelitian ini, pendidikan dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu pendidikan minimal SMA dan pendidikan SMP ke bawah.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu metode analisis regresi logistik biner. Metode ini adalah metode analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguraikan hubungan variabel respon yang berkarakter dikotomi dengan satu atau lebih variabel penjelas (Hosmer et al., 2013). Persamaan model yang dihasilkan melalui analisis regresi logistik biner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$g(x) = \ln \left[\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right] = \beta_0 X_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_8 X_8$$

dimana:

Y = $g(x)$ = Status kesejahteraan rumah tangga (1 = sejahtera, 0 = tidak sejahtera)

X₁ = Tipe daerah (1: perkotaan, 0: perdesaan)

X₂ = Jenis kelamin (1: laki-laki, 0: perempuan)

X₃ = Kepemilikan Tabungan (1: memiliki, 0: tidak memiliki)

X₄ = Akses terhadap layanan kredit (1: punya akses, 0: tidak punya akses)

X₅ = Jumlah ART (1: ≤ 4 orang, 0: > 4 orang)

X₆ = Status perkawinan (1: kawin, 0: tidak kawin)

X₇ = Umur (1: diatas 45 tahun, 0: 45 tahun ke bawah)

X₈ = Pendidikan (1: minimal SMA, 0: SMP ke bawah)

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi logistik biner adalah sebagai berikut:

1. Pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*)

Tahapan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persamaan model regresi logistik yang terbentuk sudah sesuai/fit dalam menjelaskan variabel respon (Hosmer et al., 2013). Pengujian dilakukan dengan uji *Hosmer-Lemeshow* dengan menggunakan hipotesis berikut:

H₀: Model yang dihasilkan sesuai (hasil observasi dengan hasil prediksi dari model tidak memiliki perbedaan signifikan)

H₁: Model yang dihasilkan tidak sesuai (hasil observasi dengan hasil prediksi dari model memiliki perbedaan signifikan)

Statistik uji yang digunakan adalah

$$\hat{C} = \sum_{k=1}^g \left[\frac{(o_k - n'_k \bar{\pi}_k)^2}{n'_k \bar{\pi}_k (1 - \bar{\pi}_k)} \right] \sim \chi^2_{(g-2)}$$

Keterangan:

\hat{C} : uji *Hosmer-Lemeshow* (*goodness of fit*)

g : banyaknya kelompok, $g = 1, 2, \dots, k$

o_k : total nilai variabel respon dari kelompok ke- k

$\bar{\pi}_k$: rata-rata perkiraan peluang dari kelompok ke- k

n'_k : jumlah observasi pada kelompok ke- k

Statistik uji *Hosmer-Lemeshow* (\hat{C}) memiliki distribusi *chi-square* dengan nilai $(g-2)$ sebagai derajat bebas. Dalam penelitian ini, keputusan untuk menolak hipotesis nol (H_0) akan ditetapkan jika nilai statistik uji $\hat{C} > \chi^2_{(0,05;8)}$ atau $p - value < 0,05$. Sedangkan, apabila hasil keputusan adalah gagal menolak hipotesis nol (H_0), maka dapat ditetapkan kesimpulan bahwa persamaan model yang dihasilkan telah sesuai untuk menjelaskan status kesejahteraan rumah tangga pertanian di Sumatera Utara.

2. Pengujian signifikansi parameter secara simultan

Pengujian secara simultan dilakukan dengan bertujuan untuk menguraikan pengaruh dari seluruh variabel penjelas yang terdapat dalam model terhadap status kesejahteraan rumah tangga secara serentak (*overall test*). Tahapan uji signifikansi parameter dengan cara simultan dilakukan dengan menggunakan uji *likelihood ratio* (Hosmer et al., 2013). Uji ini dilakukan terhadap hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$ (tidak ditemukan variabel penjelas yang berpengaruh terhadap variabel respon)

$H_1: \text{terdapat satu atau lebih } \beta_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, p$ (terdapat satu atau lebih variabel penjelas yang berpengaruh terhadap variabel respon)

Pengujian signifikansi parameter secara simultan diformulasikan menggunakan statistik uji sebagai berikut:

$$G = -2 \ln \left(\frac{L_0}{L_1} \right) \sim \chi^2_{(p)}$$

Keterangan:

G : uji *likelihood ratio*

L_0 : nilai *likelihood* (peluang) dari model tanpa mengikutsertakan variabel penjelas

L_1 : nilai *likelihood* (peluang) dari model dengan mengikutsertakan variabel penjelas

$\chi^2_{(p)}$: distribusi *chi-square* dengan jumlah variabel (p) sebagai derajat bebas

Statistik uji G memiliki distribusi *chi-square* dengan derajat bebas p . Dalam penelitian ini, jika nilai $G > \chi^2_{(0,05;8)}$ atau $p - value < 0,05$, maka keputusan yang ditetapkan adalah menolak hipotesis nol (H_0) yang berarti terdapat minimal satu atau lebih variabel penjelas yang secara signifikan berpengaruh terhadap status kesejahteraan rumah tangga.

3. Pengujian signifikansi parameter secara parsial

Tahap pengujian parameter secara parsial bertujuan untuk mengetahui apa saja variabel penjelas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan rumah tangga. Pengujian parsial ini dilakukan dengan memakai statistik uji *Wald* (Hosmer et al., 2013). Hipotesis yang diuji adalah:

$H_0: \beta_j = 0$ (variabel penjelas ke- j tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon)

$H_1: \beta_j \neq 0$ (variabel penjelas ke- j memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon)

Pengujian secara parsial menggunakan statistik uji *Wald* dengan formula sebagai berikut:

$$W_j = \left(\frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)} \right)^2 \sim \chi^2_{(1)}$$

Keterangan:

W_j : nilai statistik uji *Wald* dari variabel penjelas ke- j

$\hat{\beta}_j$: estimasi parameter β_j

$se(\hat{\beta}_j)$: estimasi *standar error* dari β_j

Pengujian statistik *Wald* memiliki distribusi *chi-square* dengan memiliki derajat bebas 1. Dalam penelitian ini, keputusan yang ditentukan untuk menolak hipotesis nol (H_0) diperoleh jika nilai $W_j > \chi^2_{(1)}$ atau $p - value < 0,05$. Keputusan menolak H_0 berarti dengan tingkat signifikansi sebesar α , terdapat cukup bukti mengatakan bahwa variabel penjelas ke- j berpengaruh terhadap status kesejahteraan rumah tangga.

4. Menghitung rasio kecenderungan atau *odds ratio*

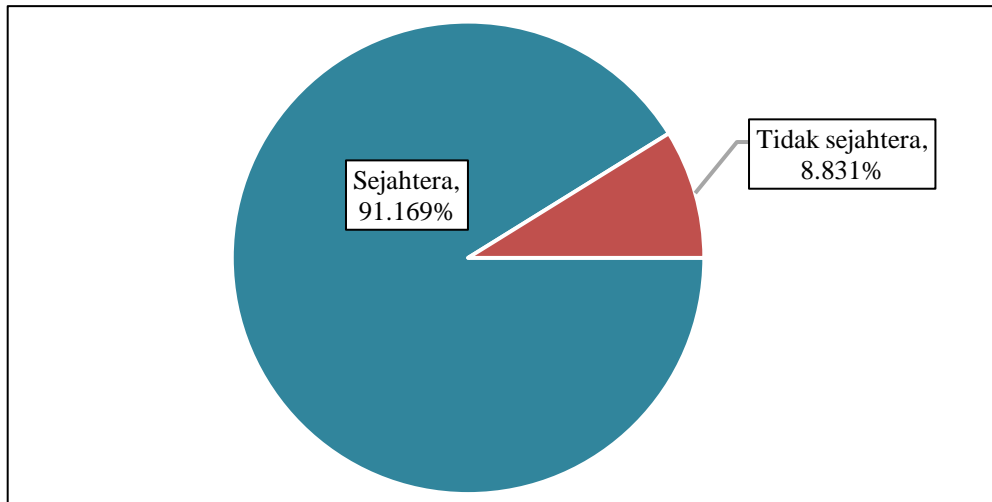
Penghitungan *odds ratio* bertujuan untuk menjelaskan kecenderungan suatu hal untuk mengalami kejadian sukses atau gagal. Dalam hal ini, kejadian sukses diartikan sebagai rumah tangga yang mengalami kesejahteraan, sedangkan kejadian gagal diartikan sebagai rumah tangga yang mengalami kemiskinan (tidak sejahtera). Penghitungan *odds ratio* dilakukan dengan formula sebagai berikut (Hosmer et al., 2013):

$$OR = \exp(\beta_j)$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

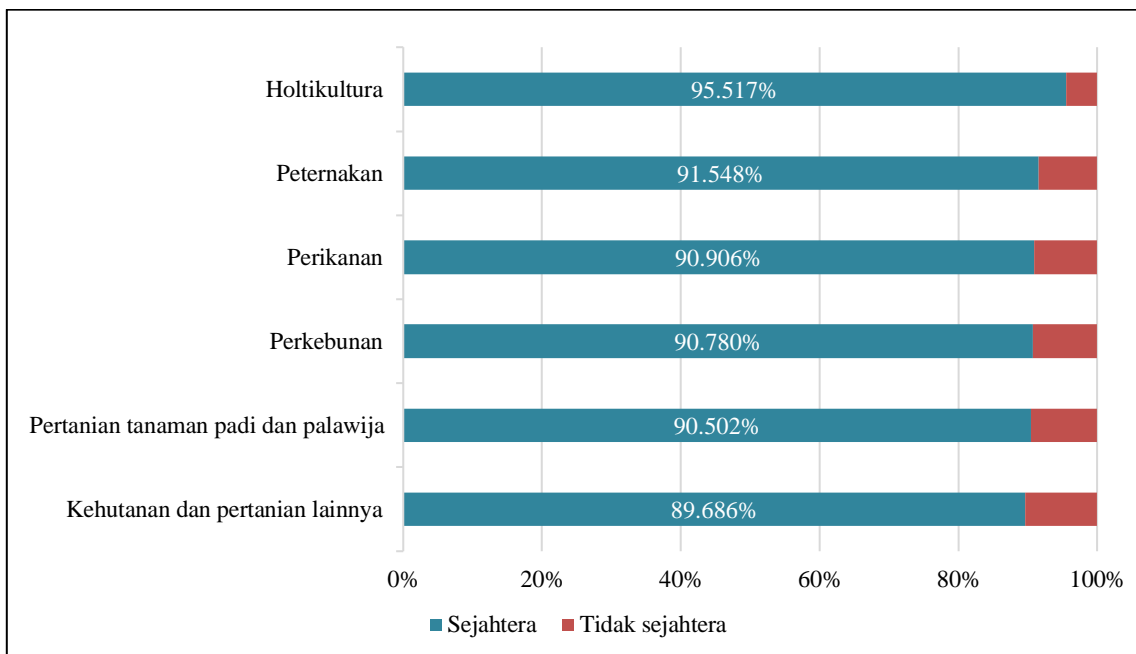
Karakteristik Rumah Tangga Pertanian di Sumatera Utara

Pertanian merupakan sektor lapangan usaha dengan persentase terbesar yang digeluti masyarakat dan telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Namun, penghasilan pekerja pada sektor pertanian masih dikategorikan jauh lebih kecil dibandingkan pekerja pada sektor lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, jasa keuangan, dan pertambangan. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan pada rumah tangga pertanian menjadi tidak terelakkan.



Gambar 2. Persentase rumah tangga pertanian berdasarkan status kesejahteraan di Sumatera Utara, 2020

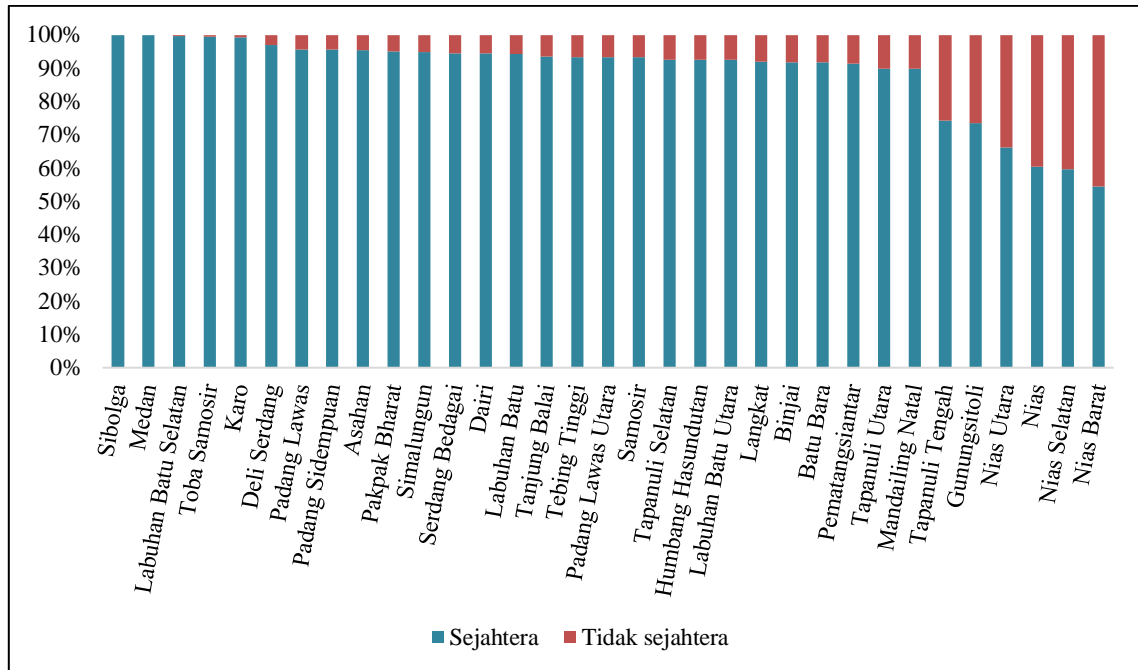
Berdasarkan data Susenas Maret 2020, ditemukan 91,17 persen rumah tangga pertanian di Sumatera Utara merupakan rumah tangga sejahtera dan 8,83 persen lainnya tidak sejahtera atau merupakan rumah tangga miskin (Gambar 2). Dengan kata lain, dari 100 rumah tangga pertanian di Sumatera Utara, terdapat 91 rumah tangga yang memilikirata-rata pengeluaran perkapita yang berada di atas garis kemiskinan dan 9 rumah tangga lainnya di bawah garis kemiskinan. Hal ini berarti mayoritas rumah tangga pertanian di Sumatera Utara merupakan rumah tangga yang sejahtera. Akan tetapi masih terdapat beberapa rumah tangga pertanian yang tergolong tidak sejahtera.



Gambar 3. Persentase rumah tangga pertanian berdasarkan status kesejahteraan dan subsektor pertanian di Sumatera Utara, 2020

Apabila dirinci menurut subsektor, rumah tangga pertanian di Sumatera Utara yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi adalah rumah tangga pada subsektor hortikultura

(95,5%). Padahal jumlah rumah tangga pertanian dengan KRT yang bekerja pada subsektor hortikultura hanya sebanyak 9,6% dari seluruh rumah tangga pertanian di Sumatera Utara. Kondisi ini dimungkinkan oleh karakteristik mayoritas tanaman hortikultura yang pengelolaannya relatif mudah dan masa panen yang singkat sehingga petani dapat lebih cepat memperoleh imbal hasil. Imbal hasil yang diperoleh kemudian digunakan kembali sebagai modal untuk pengembangan usaha pertanian hortikultura hingga dapat meningkatkan pendapatan.



Gambar 4. Persentase rumah tangga pertanian berdasarkan status kesejahteraan dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

Apabila diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan antardaerah, terdapat 5 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang memiliki kesejahteraan tertinggi pada rumah tangga pertaniannya yaitu Kota Sibolga (100%), Kota Medan (100%), Kabupaten Labuhan Batu Selatan (99,6%), Kabupaten Toba Samosir (99,5%), dan Kabupaten Karo (99,3%). Sedangkan 5 kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga pertanian sejahtera terendah adalah Kabupaten Nias Barat (54,5%), Kabupaten Nias Selatan (59,8%), Kabupaten Nias (60,5%), Kabupaten Nias Utara (66,3%), dan Kota Gunung Sitoli (73,5%). Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di kawasan Pulau Nias memiliki tingkat kesejahteraan rumah tangga pertanian yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Kabupaten/kota yang ada di Pulau Nias ini bahkan menyumbang 38,7% atau lebih dari sepertiga dari total rumah tangga tidak sejahtera di Sumatera Utara pada tahun 2020.

Tabel 1. Persentase karakteristik rumah tangga menurut karakteristik rumah tangga

Variabel	Kategori	Persentase	Persentase Status Kesejahteraan Rumah Tangga	
			Sejahtera	Tidak Sejahtera
Tipe daerah	Perkotaan	20,54	90,70	9,30
	Perdesaan	79,46	91,29	8,71
Jenis kelamin	Laki-laki	84,84	90,81	9,19
	Perempuan	15,16	93,18	6,82
Kepemilikan rekening tabungan	Memiliki	37,48	94,96	5,04
	Tidak memiliki	62,52	88,90	11,10
Akses terhadap layanan kredit	Punya	20,58	93,69	6,31
	Tidak punya	79,42	90,52	9,48
Jumlah anggota rumah tangga	≤ 4 orang	62,48	96,54	3,46
	> 4 orang	37,52	82,22	17,78
Status perkawinan	Kawin	81,32	90,47	9,53
	Tidak kawin	18,68	94,22	5,78
Umur	> 45 tahun	57,74	94,37	5,63
	≤ 45 tahun	42,26	86,79	13,21
Pendidikan terakhir	≥ SMA sederajat	31,48	93,48	6,52
	< SMA sederajat	68,52	90,11	9,89

Rumah tangga pertanian sejahtera di Sumatera Utara lebih didominasi oleh rumah tangga dengan karakteristik: berada di daerah perdesaan, memiliki KRT berjenis kelamin perempuan, memiliki rekening tabungan, mempunyai akses terhadap layanan kredit, beranggotakan maksimal 4 orang, memiliki KRT yang tidak kawin (termasuk belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati), umur KRT diatas 45 tahun, dan pendidikan terakhir KRT minimal SMA.

Determinan Kesejahteraan Rumah Tangga Pertanian di Sumatera Utara Tahun 2020

Pengaruh variabel penjelas terhadap kesejahteraan rumah tangga pertanian dianalisis dengan analisis regresi logistik biner. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menguji kesesuaian model dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow*. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil *Hosmer-Lemeshow test*

\hat{C}	<i>df</i>	<i>p-value</i>
13,701	8	0,090

Tabel 2 menunjukkan nilai statistik \hat{C} (13,701) $< \chi^2_{(0,05;8)}(15,507)$ atau *p-value* (0,090) $> \alpha$ (0,05), maka diperoleh keputusan gagal menolak H_0 . Berdasarkan keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan $\alpha = 0,05$, persamaan yang terbentuk telah sesuai untuk menjelaskan status kesejahteraan rumah tangga pertanian di Sumatera Utara.

Kemudian dilakukan pengujian simultan dengan menggunakan statistik uji *Likelihood ratio*. Hasil pengujian simultan ($\alpha = 0,05$) ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil uji simultan

	<i>G</i>	<i>df</i>	<i>p-value</i>
Step	1127,859	8	0,000
Block	1127,859	8	0,000
Model	1127,859	8	0,000

Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik *G* (1127,859) $> \chi^2_{(0,05;8)}(15,507)$ atau *p-value* (0,000) $< \alpha$ (0,05), sehingga keputusan yang diberikan yaitu tolak H_0 . Artinya terdapat satu atau lebih variabel penjelas yang memengaruhi status kesejahteraan rumah tangga pertanian di Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi variabel penjelas yang berpengaruh terhadap status kesejahteraan rumah tangga dan besarnya pengaruh masing-masing variabel penjelas, dilakukan pengujian parsial. Pengujian dilakukan dengan statistik uji *Wald* dan memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil uji parsial

Variabel	β	<i>p-value</i>	<i>Exp(β)</i>
Konstanta	- 0,005	0,967	0,995
Tipe daerah	- 0,016	0,870	0,984
Jenis Kelamin	0,618	0,001	1,855
Kepemilikan tabungan	0,705	0,000	2,023
Akses terhadap layanan kredit	0,887	0,000	2,428
Jumlah anggota rumah tangga	1,994	0,000	7,346
Status perkawinan	- 0,222	0,240	0,801
Umur	0,721	0,000	2,057
Pendidikan terakhir	0,581	0,000	1,789

Variabel penjelas yang berpengaruh terhadap status kesejahteraan rumah tangga pada tingkat signifikansi 5% yaitu jenis kelamin KRT, kepemilikan rekening tabungan, akses

terhadap layanan kredit, jumlah ART, umur KRT, dan pendidikan terakhir KRT. Adapun persamaan regresi logistik yang diperoleh adalah:

$$\widehat{g(x)} = -0,005 - 0,016X_1 + 0,618X_2^* + 0,705X_3^* + 0,887X_4^* + 1,994X_5^* - 0,222X_6 + 0,721X_7^* + 0,581X_8^*$$

Keterangan: *) = signifikan

Pada karakteristik tempat tinggal rumah tangga, tipe daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan. Akan tetapi variabel tipe daerah memiliki nilai $\exp(\hat{\beta})$ sebesar 0,984. Hal ini berarti rumah tangga di pedesaan mempunyai tingkat kecenderungan sebesar 1,016 kali untuk sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga di perkotaan. Tingginya kecenderungan rumah tangga pertanian di pedesaan untuk lebih sejahtera terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian di pedesaan lebih baik daripada di perkotaan (Jingdong et al., 2016). Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kondisi alam dan lingkungan masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian yang saling membantu dalam upaya peningkatan hasil pertanian.

Jenis kelamin dari Kepala Rumah Tangga (KRT) secara signifikan berpengaruh terhadap status kesejahteraan rumah tangga dengan nilai $\exp(\hat{\beta})$ yaitu 1,855. Kondisi ini berarti rumah tangga dengan KRT laki-laki memiliki tingkat kecenderungan sebesar 1,855 kali untuk lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki KRT perempuan. Perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin tidak jarang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pada aktivitas ekonomi, laki-laki cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan perempuan (Farahnasy, 2006). Perbedaan perlakuan tersebut terjadi dalam beberapa aspek, seperti kesempatan kerja (kuota untuk lowongan pekerjaan), kesempatan untuk promosi jabatan, dan terutama dalam aspek upah/gaji. Perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat memberikan pengaruh yang berbeda dalam kesejahteraan ekonomi rumah tangga, termasuk rumah tangga pertanian. Hal ini juga ditemukan pada hasil penelitian Sharma & Singh (2015), Han et al. (2019), dan Mutia (2020).

Kepemilikan rekening tabungan berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan rumah tangga dengan nilai $\exp(\hat{\beta})$ sebesar 2,023. Kondisi ini berarti rumah tangga yang minimal salah satu ART-nya mempunyair rekening tabungan, memiliki kecenderungan sebesar 2,023 kali untuk lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga dengan karakteristik tidak memiliki rekening tabungan. Tabungan adalah salah satu bentuk modal keuangan yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (Hidayat et al., 2020). Kepemilikan tabungan membantu rumah tangga untuk mengatur aset finansial guna memperbaiki kondisi perekonomian. Rumah tangga yang memiliki tabungan umumnya memiliki kebiasaan menabung. Hal ini akan membantu rumah tangga untuk keluar dari kondisi miskin. Rumah tangga yang menyisihkan penghasilannya dapat menggunakan tabungan sebagai dana darurat, modal usaha, biaya sekolah anak, dan lainnya. Pemanfaatan tabungan dengan berbagai cara tersebut akan membantu peningkatan

perekonomian rumah tangga. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Mohammed (2017), Han et al. (2019), dan Zewdie (2021).

Akses terhadap layanan kredit berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan rumah tangga dengan nilai $exp(\hat{\beta})$ sebesar 2,428. Hasil ini berarti rumah tangga dengan kepemilikan akses terhadap layanan kredit cenderung 2,428 kali untuk lebih sejahtera dibandingkan rumah tangga yang tidak mempunyai akses terhadap layanan kredit. Hasil temuan Nasiraei et al. (2013) menyatakan bahwa ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan kredit dapat membantu masyarakat, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Ketersediaan dan penggunaan layanan kredit keuangan dapat memberikan tambahan modal bagi masyarakat dalam menjalankan usaha, dalam hal ini usaha pada bidang pertanian. Ketersediaan tambahan modal ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian diantaranya dengan cara menambah jumlah bibit, membeli bibit yang lebih berkualitas, menggunakan teknologi pertanian yang lebih baik, meningkatkan luas lahan olahan, dsb. Selanjutnya, peningkatan produktivitas tersebut akan meningkatkan produksi dan menambah penghasilan rumah tangga pertanian.

Jumlah ART berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan rumah tangga dengan nilai $exp(\hat{\beta})$ sebesar 7,346. Hal ini berarti rumah tangga yang beranggotakan paling banyak 4 orang memiliki tingkat kecenderungan sebesar 7,346 kali untuk sejahtera dibandingkan rumah tangga yang beranggotakan lebih dari 4 orang. Dengan kata lain, jumlah ART yang lebih sedikit dapat memberikan peluang untuk lebih sejahtera pada rumah tangga pertanian. Temuan ini sejalan dengan Nasiraei et al. (2013) yang menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak akan mengurangi kesempatan rumah tangga untuk keluar dari kondisi miskin dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Ogwumike & Akinnibosun (2013) menambahkan bahwa peningkatan jumlah ART akan memperbesar peluang untuk menjadi tidak sejahtera dikarenakan keberadaan ART yang tidak produktif dan peningkatan kebutuhan konsumsi dalam rumah tangga. Hasil temuan ini juga sejalan dengan Han et al. (2019) dan Mutia (2020).

Variabel status perkawinan KRT tidak berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan. Akan tetapi variabel ini memiliki nilai $exp(\hat{\beta})$ sebesar 0,801. Artinya rumah tangga dengan KRT berstatus tidak kawin mempunyai kecenderungan sebesar 1,248 kali untuk sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki KRT berstatus kawin. Kondisi ini dapat dimungkinkan karena seorang KRT yang tidak kawin atau sedang tidak terikat status perkawinan memiliki beban moral yang lebih sedikit dibandingkan KRT yang berstatus kawin sehingga dapat lebih fokus dalam menambah penghasilan.

Umur KRT berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan rumah tangga dengan nilai $exp(\hat{\beta})$ sama dengan 2,057. Kondisi ini berarti rumah tangga dengan KRT berumur di atas 45 tahun akan cenderung 2,057 kali untuk lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga dengan KRT berumur 45 tahun ke bawah. Atau dapat dikatakan bahwa KRT yang lebih dewasa secara

umum lebih dapat memberikan kesejahteraan pada rumah tangga pertanian. Temuan dalam Tabel 1 menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang mempunyai karakteristik kepala rumah tangga berusia tua cenderung lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang mempunyai karakteristik kepala rumah tangga berusia muda. Usia seorang pekerja berkorelasi dengan penghasilan yang diperolehnya. Penghasilan yang rendah ketika seseorang masih muda (dikarenakan pengalaman kerja yang masih minim) akan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan usianya (mengindikasikan akumulasi pengalaman yang lebih banyak) (Garza-Rodriguez et al., 2021). Pengaruh signifikan oleh usia seorang kepala rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangganya juga ditemukan dalam hasil penelitian Nasiraei et al. (2013) dan Majeed & Malik (2015). Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat kesejahteraan yang lebih baik dimiliki oleh rumah tangga dengan KRT yang berusia tua salah satunya disebabkan KRT dengan usia tua sudah memiliki kekayaan dan aset yang banyak selama bekerja di usia muda. Hasil temuan ini sejalan dengan Sharma & Singh (2015) dan Han et al. (2019).

Pendidikan terakhir KRT berpengaruh signifikan terhadap status kesejahteraan rumah tangga dengan nilai $exp(\hat{\beta})$ sama dengan 1,789. Situasi ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan KRT berpendidikan minimal SMA akan cenderung 1,789 kali untuk lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh KRT berpendidikan SMP ke bawah. Pendidikan merupakan salah satu modal yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan (Hidayat et al., 2020). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagai indikator keterampilan individu yang lebih baik, khususnya pada KRT, dapat memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga. Pencapaian pendidikan yang tinggi dapat memberikan peluang kerja yang lebih besar, terutama dalam konteks bidang pertanian akan meningkatkan kemampuan untuk mencapai potensi teknologi pertanian dan teknik pertanian yang mumpuni (Malik, 1996). Temuan ini mendukung hasil penelitian Utomo & Rahani (2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan KRT berhubungan erat dengan status sosial ekonomi rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan seorang KRT menyulitkan dirinya untuk bersaing dalam lapangan pekerjaannya. Akibatnya penghasilan mereka akan lebih rendah daripada KRT lainnya yang berpendidikan lebih tinggi. Sehingga, mayoritas rumah tangga yang dipimpinnya akan masuk kategori rumah tangga yang tidak sejahtera. Aigbokhan (2008) menambahkan bahkan rumah tangga yang memiliki KRT dengan karakteristik tingkat pendidikan rendah akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan rumah tangga yang dipimpin oleh KRT berpendidikan lebih tinggi. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharma & Singh (2015), dan Mutia, (2020).

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan yakni mayoritas rumah tangga pertanian di Sumatera Utara (91,17 persen) pada tahun 2020 merupakan rumah tangga sejahtera, dimana Kota Sibolga dan Kota Medan merupakan kota yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi. Sebagian besar rumah tangga pertanian di Sumatera Utara memiliki karakteristik tinggal di wilayah perdesaan, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki akses terhadap layanan kredit, dan memiliki anggota rumah tangga kurang dari 4 orang. Selain itu, karakteristik KRT di dalam mayoritas rumah tangga pertanian di Sumatera Utara yaitu berjenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, berusia diatas 45 tahun, dan berpendidikan maksimal SMP.

Jika ditinjau dari status kesejahterannya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pertanian sejahtera di Sumatera Utara didominasi oleh rumah tangga dengan karakteristik: bertempat tinggal di daerah perdesaan, memiliki KRT berjenis kelamin perempuan, memiliki rekening tabungan, mempunyai akses terhadap layanan kredit, beranggotakanmaksimal 4 orang, KRT tidak kawin,umur KRT diatas 45 tahun, dan pendidikan terakhir KRT minimal SMA.

Peningkatan kesejahteraan dapat terjadi secara signifikan pada rumah tangga pertanian di Sumatera Utara yang mempunyai karakteristik KRT berjenis kelamin laki-laki, memiliki rekening tabungan, memiliki akses terhadap layanan kredit, memiliki jumlah ART 4 orang ke bawah, berusia diatas 45 tahun, dan KRT berpendidikan tinggi (minimal SMA/ sederajat). Sementara itu, variabel tipe daerah dan status perkawinan tidak mempengaruhi status kesejahteraan rumah tangga pertanian.

Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitupemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan kredit bagi petani seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai bank BUMN dan swasta untuk penyediaan pelayanan KUR. Selain itu, perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada petani terkait cara memanfaatkan KUR untuk meningkatkan manfaat kredit yang diterima sebagai tujuan peningkatan usaha pertanian. Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah perlu tetap melakukan pengendalian jumlah anggota rumah tangga dengan terus menggencarkan program KB bagi masyarakat, khususnya yang bekerja pada sektor pertanian. Pada sektor pekerjaan, pemerintah perlu memfasilitasi sarana pendidikan dan pelatihan untuk para petani, khususnya petani muda agar dapat meningkatkan kemampuannya. Bentuk pendidikan baik berupa sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi dengan program pendidikan yang mendukung pengembangan pertanian, seperti agroteknologi, agribisnis, peternakan, teknik pertanian, dan ilmu teknologi pangan. Sementara, contoh bentuk pelatihan yang dapat dilakukan yaitu pelatihan pengolahan tanah, budidaya ikan, pertanian organik, dan lain sebagainya. Berbagai program pelatihan tersebut dapat dilaksanakan bekerjasama dengan dinas pertanian ataupun pihak swasta yang bergerak di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, A. W., & Sugiharti, L. (2019). Profil Dan Determinan Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 10(2).
- Aigbokhan, B. (2008). Poverty, growth and inequality in Nigeria: A case study. *African Economic Research Consortium (AERC)*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020b). *Rata-Rata Upah/Gaji (Rupiah), 2019-2020*. www.bps.go.id/indicator/19/1521/2/rata-rata-upah-gaji.html
- Badan Pusat Statistik. (2020c). *Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama, 2020*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2020/07/07/2096/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-jenis-pekerjaan-utama-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020d). *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara 2020*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Analisis Peranan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Utara 2020*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Chen, K. M., Leu, C. H., & Wang, T. M. (2019). Measurement and Determinants of Multidimensional Poverty: Evidence from Taiwan. *Social Indicators Research*, 145(2), 459–478. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02118-8>
- Cho, S., & Kim, T. (2017). Determinants of Poverty Status in Rwanda. *African Development Review*, 29(2), 337–349. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12260>
- Farahnasy, I. (2006). *Faktor Penentu Upah di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Garza-Rodriguez, J., Ayala-Diaz, G. A., Coronado-Saucedo, G. G., Garza-Garza, E. G., & Ovando-Martinez, O. (2021). Determinants of poverty in Mexico: A quantile regression analysis. *Economies*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.3390/economies9020060>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pub. L. No. 11 (2009).
- Han, J., Wang, J., & Ma, X. (2019). Effects of Farmers' Participation in Inclusive Finance on Their Vulnerability to Poverty: Evidence from Qinba Poverty-Stricken Area in China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(5), 998–1013. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1523789>
- Hermawan, I. (2012). Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(2), 135. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.348>
- Hidayat, E. W., Rosyadi, & Bariyah, N. (2020). Human Development Index, Unemployment and Poverty Rate in Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Jingdong, L., Rehman, A., Khatoon, R., Iqbal, M. S., & Hussain, I. (2016). Effect of Agricultural Growth on Poverty Reduction, its Importance and Suggestions. *Transylvanian Review*, XXIV(5), 449–454.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, (2016).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Majeed, M. T., & Malik, M. N. (2015). Determinants of household poverty: Empirical evidence from Pakistan. *Pakistan Development Review*, 54(4), 701–717.

- <https://doi.org/10.30541/v54i4i-iipp.701-718>
- Malik, S. (1996). Determinants of Rural Poverty in Pakistan: A Micro Study. *The Pakistan Development Review*, 35(2), 171–187.
- Mohammed, M. B. (2017). Measurement and Determinants of Urban Poverty in Case of Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR), Ethiopia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 7(3), 181–189.
- Mutia, R. (2020). Analisis Penyebab Kemiskinan Petani Sektor Perkebunan Rakyat di Provinsi Aceh, Berdasarkan Faktor Individu dan Rumah Tangga. *Kinerja*, 17(1), 129–139.
- Nasiraei, S. M., Hosseini, S. J. F., & Farhangfar, H. (2013). Factors affecting economic prosperity of rural families in the South Khorasan Province (Iran). *African Journal of Business Management*, 7(17), 1675–1678.
- Nwaru, J. C. (2005). Determinants of Farm and Off-Farm Incomes and Savings of Food Crop Farmers in Imo State, Nigeria: Implication For Pverty Allevation. *Niger Agric*, 36, 26–42.
- Ogwumike, F. O., & Akinnibosun, M. K. (2013). Determinants of poverty among farming households in Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(2), 365–373. <https://doi.org/10.5901/mjss.2013.v4n2p365>
- Ramadhani, F., & Putra, F. S. (2019). Having a Job Is Not Enough to Escape Poverty: Case of Indonesian Working Pooers. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 6.
- Sharma, R., & Singh, G. (2015). Access to modern agricultural technologies and farmer household welfare: Evidence from India. *Millennial Asia*, 6(1), 19–43. <https://doi.org/10.1177/0976399614563222>
- Sihombing, A. O., & Bangun, R. H. (2019). Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agrica*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.31289/agrica.v12i1.2220>
- Sukirno. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Utomo, A. P., & Rahani, R. (2013). Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita Kepala Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 192–206.
- Warto. (2015). Kondisi Kemiskinan Petani dan Upaya Penanggulangannya Poor Peasant Condition and Its Prevention Effort. *Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI*, 20–30.
- Zewdie, T. (2021). Determinants of Urban Poverty in Ethiopia: The Case of Jimma Town, South West Ethiopia. *Civil and Environmental Research*, 13(4), 1–10.